

**Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 pada
Domain DSS dan MEA (Studi Kasus : Bappeda Kabupaten Tulungagung)**
Erricson Hardiansyah¹, Eko Darwiyanto², Ibnu Asror³

^{1,2,3}Fakultas Informatika, Universitas Telkom, Bandung
erricsonh@students.telkomuniversity.ac.id, ²ekodarwiyanto@telkomuniversity.ac.id,
³iasror@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tata kelola Teknologi Informasi adalah hal yang harus dikuatkan untuk pelaksanaan *e-government* demi tercapainya *good governance*. Dalam pelaksanaan *e-government*, Bappeda Kabupaten Tulungagung tidak optimal dalam menerapkan tata kelola TI, mengingat bahwa TI dapat membantu tercapainya tujuan bisnis dari setiap perusahaan/instansi dengan efektif dan efisien. Untuk membantu Bappeda menyelaraskan TI dengan tujuan bisnisnya, tata kelola TI harus diperhatikan. COBIT 5 merupakan kerangka kerja yang memiliki mekanisme COBIT 5 *Goals Cascade* untuk membantu menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis perusahaan/instansi, dan juga menyediakan *assessment model* (penilaian) pada *current capability level* (kemampuan saat ini) sehingga dapat dilakukan evaluasi agar TI yang ada pada Bappeda selaras dengan tujuan bisnisnya, dimana target *capability level* Bappeda adalah level 2 (*Managed Process*). Penelitian ini juga dibantu dengan *pairwise comparison matrix* dari metodologi AHP untuk penentuan prioritas domain *process Assessment* dilakukan pada domain yang terseleksi yaitu DSS03 dengan hasil *capability level* 1, DSS04 dengan hasil *capability level* 1, MEA01 dengan hasil *capability level* 1, dan MEA02 dengan *capability level* 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DSS03, DSS04, dan MEA01 belum dapat mencapai *capability level* yang di harapkan sehingga harus menerapkan rekomendasi yang telah diberikan oleh penelitian ini untuk mencapai *capability level* 2.

Kata kunci : COBIT 5, AHP, e-government
